

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH UNDANG-UNDANG NOMO R 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA JUNCTO PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PERNEBITAN IZIN OPERASIONAL SERTA EVALUASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

ABSTRAK

Perkembangan kreativitas masyarakat Indonesia memunculkan karya-karya baru. Suatu karya baru dapat memajukan karya cipta di Indonesia. Pencipta memiliki hak atas karya ciptanya; yaitu hak moral dan hak ekonomi yang berupa royalti. Sebuah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) adalah lembaga pemungutan royalti yang telah menerima kuasa dari para pemegang hak. LMKN dibantu oleh LMK dalam hal mengumpulkan royalti-royalti. Namun, keberadaan LMK menyebabkan ketidakpastian status bagi LMKN. Pemerintah diperlukan fungsinya untuk mengawasi LMK dan LMKN.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji status dan kedudukan LMKN. LMKN dikaji dengan menggunakan pendekatan asas-asas hukum/ajaran/doktrin hukum yang mengacu pada pendapat para ahli HKI. Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan baku primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, bahan kepustakaan, buku-buku, dan sebagainya.

Hasil penelitian penulis menyatakan bahwa LMKN merupakan organisasi, namun bukan merupakan lembaga. Hal tersebut tidak sesuai dalam Pasal (87) sampai pasal (93) Undang-Undang Hak Cipta yang tidak menyebutkan secara tegas mengenai bentuk hukum LMKN. peran pembinaan dan pengawasan pemerintah belum dapat sepenuhnya berjalan karena hambatan rantai koordinasi.

Kata Kunci: LMKN, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah, Hak Cipta.

**A JURIDICAL STUDY OF LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
NASIONAL IN RELATION WITH SUPERVISION AND DEVELOPMENT
BY GOVERNMENT ACT NO.28 2014 IN RESPECT TO LAW MINISTER
JUNCTO COPYRIGHTS REGULATION AND HUMAN RIGHTS
INDONESIAN REPUBLIC, NO.29 2014 IN RESPECT OF THE PROCEDURE
TO APPLY AND PUBLISH OPERATIONAL PERMIT AND ALSO
EVALUATION OF LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF**

ABSTRAK

The growth of Indonesian society has produced new creations. A new creation could bring copyright in Indonesia into the next level. The writer has rights for their own copyrights; moral right and economic right that is expressed as royalty. An institute called Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) is an Institute that collecting the royalty given rights by the copywriters. LMKN supported by LMK in terms of collecting royalties, but the existence of LMK have caused uncertain status for LMKN. Therefore, the Government needs to be in function to supervise LMK and LMKN.

Juridical Normative method has been selected to be used for this study reviewed the status and position of LMKN. LMKN got reviewed by using the principle of law/teachings/doctrine approach in regards of HKI specialist opinions. The data used in this study is secondary data consisted of primary resource of Acts No.28 2014 in respect of Law Minister Juncto Copyrights Regulation and Human Rights, No.29 2014 in respect of the Procedure to Apply and Publish Operational Permit and also the Evaluation of Lembaga Manajemen Kolektif, library resources, books, etc.

The result of this study has stated that LMKN is an organization but not an institute. This is not in accordance with Article (87) up to Article (93) in respect to Copyrights Act where the legal form of LMKN is not clearly stated. The role of government to supervise and develop still could not be fully implemented because of the problem that occurred in chain of coordination.

Keywords: LMKN, Supervision and Development by Government and Copyrights

DAFTAR ISI

	HALAMAN
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17

BAB II LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL	20
A. Definisi Dan Sejarah LMKN	20
B. Luas Lingkup LMKN	24
C. Tugas dan Fungsi LMK di Indonesia	28
D. Wewenang LMKN Menurut Hukum Positif	30
E. LMKN Sebagai Subjek Hukum	32
F. Kedudukan Subjek Hukum Yang Berupa Badan Hukum	37
BAB III PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KARYA CIPTA DI INDONESIA	42
A. Pembagian Kekuasaan Dalam Organisasi Negara	42
B. Hubungan Diantara Lembaga-Lembaga di Pemerintah Berdasarkan Asas-Asas Pemerintahan Ynag Baik	52
C. Sistem Pola Koordinasi Antara LMKN dan LMK di Indonesia ..	59
D. Asas-Asas Pemerintahan yang Baik	60
E. Peranan Pembinaan Oleh Pemerintah Terhadap LMK	65
F. Peranan Pemerintah Sebagai Pengawas Terhadap LMK	66

BAB IV KEDUDUKAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA JUNCTO PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SERTA EVALUASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF.....	71
A. Status dan Kedudukan LMKN	71
B. Pengaturan Pemerintah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Terhadap LMKN	89
BAB V SIMPULAN	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99